

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Afrizal Tahar & Maulida Zakhiya

E-mail : Afrizaltahar@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The purposes of this research is to verify, firstly what is the Local Government Revenue (PAD) has positive impact toward regional sufficiency, and what is the General Allocation Fund (DAU) has negative impact toward regional independent. Secondly, what is the Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) that is supported by regional independent will give good influence toward the economic growth. The research method in this thesis is to use purposive sampling method, with a total sample of 36 districts/cities each year from 56 districts/cities in Kalimantan Island. This research was done from 2003 to 2008. The data was got from the Central Statistical Agency (BPS) and the site of Directorate General of Fiscal Balance (www.djpk.depkeu.go.id). The data that is analyzed prepared from Consolidated Actual Revenues and Expenditures Budget (APBD) and the Growth Rate Data (PDRB). From the result of research indicates the Local Government Revenue (PAD) has positive and significant impact toward regional independent, the General Allocation Fund (DAU) has negative impact toward regional independent. While, the Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) that is supported by regional independent do not have significant impact toward the economic growth.

Keywords: *Local Government Revenue, General Allocation Fund, Regional Independent, Economic Growth.*

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi fiskal tertuang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya UU tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah

otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Apriana, 2010).

Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Seperti yang dikemukakan oleh Darumurti dan Rauta (2000:49)

dalam Susantih (2009) bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, namun disisi lain dapat memunculkan persoalan baru, hal ini dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Menurut penelitian Adi (2005) dalam Apriana (2010) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Silitonga (2009) menjelaskan bahwa gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan daerah lain dalam mencapai cita-cita otonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah namun tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasa tidak akan memberi arti (Harianto dan Adi, 2007). Brata (2004) dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata belum mencakup periode

setelah otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu agresif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya.

Peneliti akan menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan *lag* 1 tahun terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

TIN JAUAN PLITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTEIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Soekarwo (2003) dalam Andirfa (2009) pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan).
- 2) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting

mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan redistribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar (Sidik, 2004:96) dalam (Muliana, 2009). DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2004:150) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2004), terdapat

empat pola hubungan tingkat kemandirian daerah antara lain:

- 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah.
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campurtangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campurtangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun ke tahun.

Menurut Todaro (1997) dalam Fitriyanti (2009) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital.
- c. Kemajuan teknologi.

Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah

Menurut penelitian Susilo dan Hariadi (2007) menyatakan rata-rata rasio kemandirian daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah sesudah era otonomi (0,09) lebih kecil dibandingkan sebelum era otonomi (0,11) sehingga terjadi penurunan rasio kemandirian daerah. Hal ini berarti bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat sesudah otonomi daerah.

Penelitian Fitriyanti (2009) dan Apriana (2010) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap kemandirian daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya PAD maka akan berpengaruh pada peningkatan rasio kemandirian daerah. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah.

Dana Alokasi Umum dan Kemandirian Daerah

Hasil penelitian Dewi (2006) dalam Susilo dan Hariadi (2007) menyimpulkan bahwa pada provinsi Jawa Tengah sesudah pelaksanaan otonomi daerah, DAU memberikan pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah yang artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh DAU daripada PAD. Hal ini dapat dikatakan peran DAU dan PAD sangat berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Apabila DAU suatu daerah kecil maka kemandirian daerah akan semakin besar, karena daerah sudah dapat meningkatkan peran PAD dalam total penerimaan APBD.

Penelitian Ariani (2010) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif ter-

hadap tingkat kemandirian daerah dengan nilai t hitung sebesar $-3,359$. Jika DAU bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian Muliana (2009) juga menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai koefisien beta sebesar $-0,424$. Artinya jika DAU ditingkatkan maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar $0,424$. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Apriana (2010) tentang analisis hubungan antara belanja modal, PAD, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi, menyimpulkan bahwa PAD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan PAD tidak serta merta meningkatkan daya beli masyarakat maupun kesejahteraannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Penelitian Rumanti (2009) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai CR sebesar $16,603$. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa besarnya PDRB untuk menilai pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya PAD. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. Menurut Rumanti (2009) lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintahan, sehingga ada unit kerja yang kelebihan pembiayaan, ada pula unit kerja yang kekurangan pembiayaan. Hal ini akan berdampak pada perekonomian daerah umumnya dan keuangan daerah pada khususnya.

Hasil penelitian Sihite (2009) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Isa (2010) menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₄: *Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Apriana (2010) menyimpulkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah belum memaksimalkan potensi lokal salah satunya dengan mempermudah proses investasi.

Menurut penelitian Hamzah (2008) juga menyimpulkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan semakin besar PAD yang diperoleh serta

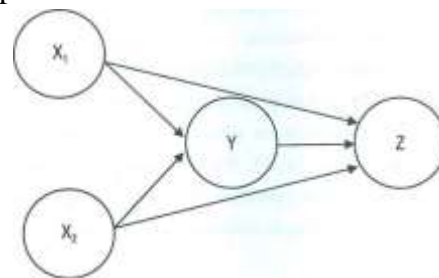
semakin kecil pinjaman dan bantuan dari pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. Dengan semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₅: *Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

METODE PENELITIAN

Sampel dan Data Penelitian

Sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah di Pulau Kalimantan. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data realisasi APBD kabupaten dan kota di pulau Kalimantan tahun 2003-2007. Untuk kepentingan analisis, data PAD dan DAU yang digunakan berdasarkan realisasi anggaran tahun 2003-2006, data kemandirian daerah diukur dengan rasio kemandirian, menggunakan data realisasi anggaran tahun 2004-2007 sedangkan data pertumbuhan ekonomi, menggunakan data laju pertumbuhan PDRB tahun 2005-2008.



Gambar 1. Model Penelitian

Keterangan:

X₁ = PAD; X₂ = DAU; Y = KD; Z = PE

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terdapat dua jenis variabel yaitu variabel eksogen dan endogen. Variabel PAD dan DAU merupakan variabel eksogen.

Variabel kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel endogen. PAD dan DAU diukur dengan menghitung angka-angka pendapatan asli daerah dalam laporan realisasi anggaran dari tahun 2003-2006. Kemandirian daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

Alat Analisis Data

Penelitian ini menguji hipotesis dengan metode regresi linier berganda

dengan perluasan analisis jalur. Analisis jalur dapat dilihat dari uji *standardised coefficient beta* dan uji koefisien determinasi. Untuk menguji hipotesis terdapat dua model penelitian, yaitu: Untuk menguji hipotesis 1 dan 2 menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Untuk menguji hipotesis 3,4 dan 5 menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Z = \alpha_1 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Y + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kemandirian Daerah

Z = Pertumbuhan Ekonomi

α_1 = Konstanta

β = Koefisien Jalur

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Belanja Modal

X_3 = Pendapatan Asli Daerah

X_4 = Belanja Modal

ε = error

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Devi
Pendapatan Asli Daerah	129	646,690,000	114,184,730,000	19,485,324,263.57	18,090,043,918.034
Dana Alokasi Umum	129	31,970,000,00	519,853,000,000	187,091,412,341.0	87,147,012,334.147
Kemandirian Daerah	129	0 0.39%	14.18%	9 5.3845%	3.18193%
Pertumbuhan Ekonomi	129	-0.84%	11.20%	5.1220%	1.84012%
Valid N (listwise)	129				

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 memberikan gambaran umum kabupaten/kota yang terdiri atas variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, kemandirian daerah dan pertumbuhan

ekonomi dengan jumlah sampel (N) sebanyak 129. Memperoleh 129 sampel kabupaten/kota karena telah dilakukan pemangkasan (*trimming*) sebanyak 15 dari 144 sampel guna memperoleh data yang normal. Tabel 4.1. menunjukkan pendapatan asli daerah mempunyai nilai rata-rata sebe-

sar 19,485,324,263.57 rupiah dengan standar deviasi sebesar 18,090,043,918.034 rupiah. Dana alokasi umum mempunyai nilai rata-rata dana sebesar 187,091,412,341.09 rupiah dengan standar deviasi sebesar 87,147,012,334.147 rupiah. Kemandirian daerah mempunyai nilai rata-rata sebesar 5.3845% dengan standar deviasi sebesar 3.18193%. Pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai rata-rata sebesar 5.1220% dengan standar deviasi sebesar 1.84012%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan adalah berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2009) data dikatakan berdistribusi normal apabila $rxftaxAsj\text{mp Sig. (2-tailed)}$ lebih besar dari α (0.05). Pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dilihat dari nilai $Asymp. Sig. (2-tailed) > \alpha$ (0.05).

Tabel 2.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		129	129
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	2.58397074	1.81267745
Most Extreme Differences	Absolute	.098	.100
	Positive	.098	.097
	Negative	-.060	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		1.111	1.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.170	0.149

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinieritas Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.512	.569		7.934	.000		
Pendapatan Asli Daerah	1.037E-10	.000	.589	8.018	.000	.968	1.033
Dana Aiokasi Umum	-6.139E-12	.000	-.168	-2.287	.024	.968	1.033

Tabe 4.
Hasil Uji Multikolinieritas Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
2 (Constant)	4.284	.490		8.735	.000		
Pendapatan Asli Daerah	-9.431 E-12	.000	-.093	-.842	.401	.641	1.559
Dana Aiokasi Umum	3.473E-12	.000	.164	1.800	.074	.930	1.075
Kemandirian Daerah	.069	.063	.119	1.100	.273	.659	1.516

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi antar variabel bebas salingberkorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam suatu model regresi dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Pada model 1 dan model 2 terlihat bahwa nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* > 0.1, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada masing-masing model.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2009:125). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji *White*. Pengujiannya adalah jika *c* hitung < *c* tabel maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dimana *c* hitung = $n \times R^2$, sedangkan *c* tabel didapatkan dengan melihat tabel *chisquare* (Ghozali, 2009).

Tabel 5.

Uji Heterokedastisitas Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.559 ^a	.313	.285	10.42217

Tabel 6

Uji Heterokedastisitas Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
2	.262 ^a	.069	.015	6.66443

Hasil uji heterokedastisitas yang disajikan pada table 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa model 1 dan model 2 mempunyai nilai *c* hitung < *c* tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi tujuannya untuk menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Metode yang digunakan adalah uji *Run Test* yaitu menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi (Ghozali, 2009).

Tabel 7.

Hasil Hasil Uji Autokorelasi Model 1

	Unstandardized Residual
Test Value ⁸	-.28956
Cases < Test Value	64
Cases > = Test Value	65
Total Cases	129
Number of Runs	55
Z	-1.856
Asymp. Sig. (2-tailed)	.064

Tabel 8.

Hasil Hasil Uji Autokorelasi Model 2

	Unstandardized Residual
Test Value ⁸	-.00200
Cases < Test Value	64
Cases > = Test Value	65
Total Cases	129
Number of Runs	66
Z	.089
Asymp. Sig. (2-tailed)	.929

Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* diatas tingkat signifikansi α (0.05) yang artinya tidak ada autokorelasi (Ghozali, 2009). Pada model 1 dan model 2 terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > α (0.05), maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada masing-masing model.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pada tabel 9 ditunjukkan bahwa nilai *standardised coeficient beta* untuk variabel PAD adalah 0.589 dengan nilai sig. 0.000 < α (0.05), sehingga dapat disimpulkan PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian

daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Kalimantan berhasil mengoptimalkan PAD yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Pemerintah daerah di Kalimantan terus berupaya mencari langkah-langkah terobosan baru agar PAD yang diperoleh akan semakin besar.

PAD yang besar akan menyebabkan kemandirian daerah juga semakin besar. Nilai *standardised coefficient beta variabel DAU adalah -0.168 dengan nilai sig. 0.024*

$< \alpha (0.05)$, sehingga dapat disimpulkan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Hal ini berarti semakin besar transfer dana yang diberikan kepada daerah maka kemandirian daerah akan menurun.

Pada tabel 9 ditunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0.330. Hal ini berarti bahwa variabel kemandirian daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU sebesar 33% sedangkan sisanya 67% mampu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan didalam penelitian ini.

Tabel 9.
Hasil Pengujian Hipotesis Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.512	.569		7.934	.000
Pendapatan Asli Daerah	1.037E-10	.000	.589	8.018	.000
Dana Alokasi Umum	-6.139E-12	.000	-.168	-2.287	.024
Adjusted R Square					.330

Tabel 10.
Hasil Pengujian Hipotesis Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.284	.490		8.735	.000
Pendapatan Asli Daerah	-9.431E-12	.000	-.093	-.842	.401
Dana Alokasi Umum	3.473E-12	.000	.164	1.800	.074
Kemandirian Daerah	.069	.063	.119	1.100	.273
Adjusted R Square					.006

Pada tabel 10 ditunjukkan bahwa nilai *standardised coefficient beta untuk variabel PAD adalah - 0.093 dengan nilai sig. 0.401 > $\alpha (0.05)$* , sehingga dapat disimpulkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan peningkatan PAD tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

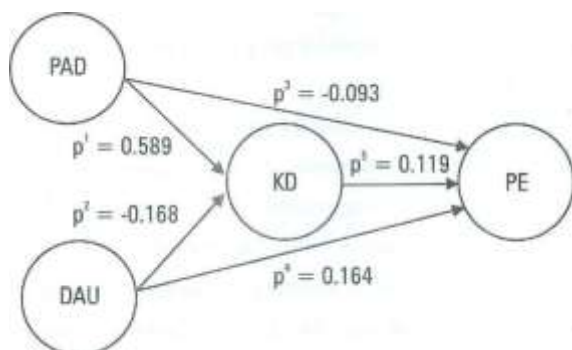
Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan peran sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PAD yang diperoleh tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, contohnya untuk kepentingan publik seperti membangun jalan, pasar, rumah sakit dan sarana prasarana

lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai *standardised coeficient beta* untuk variabel DAU adalah 0.164 dengan nilai sig. 0.074 > a (0.05). Hal tersebut disebabkan DAU yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Hal inilah mungkin yang menyebabkan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilai *standardised coeficient beta* untuk variabel PAD adalah 0.119 dengan nilai sig. 0.273 > a (0.05). Hal ini disebabkan pemerintah daerah belum memaksimalkan potensi lokal salah satunya dengan mempermudah proses investasi. Seharusnya dengan meningkatnya kemandirian suatu daerah, maka pemerintah daerah juga harus meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung



Gambar 2. Output Struktur Lengkap

Dari tabel 10 ditunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0.006, hal ini berarti bahwa

variabel pertumbuhan dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan kemandirian daerah sebesar 0.6% sedangkan sisanya 99.4% mampu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini.

Berdasarkan gambar 2 disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tidak langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah dan tidak ada pengaruh langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak ada pengaruh tidak langsung DAU terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah dan tidak ada pengaruh langsung DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak ada pengaruh langsung kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh tidak langsung dan tidak ada pengaruh langsung pada gambar *path analysis* ini.

PENUTUP

Dari penelitian diatas, maka dapat disimpulkan pertama, PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Kedua, DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Ketiga, PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran yang dapat disampaikan adalah pertama, penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperbanyak kabupaten/kota yang akan diuji dan mengambil sampel kabupaten/kota di luar Kalimantan, agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota di luar Kalimantan. Ketiga, penelitian berikutnya sebaiknya periode waktu penelitian hen-

daknya lebih diperpanjang perbedaan waktunya (*lag*) untuk mengetahui kecerendungan dalam jangka panjang.

Adapun keterbatasan masalah dari penelitian ini adalah pertama, tingkat *Adjusted R Square* yang rendah untuk variabel endogen kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, sampel pada penelitian ini hanya dibatasi pada kabupaten dan kota tertentu, yaitu 36 kabupaten dan kota di pulau Kalimantan. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Terakhir, variabel eksogen PAD berpengaruh terhadap kemandirian daerah, dimana kemandirian daerah diukur dari PAD dibagi total pendapatan daerah, sehingga ada tautologi pada penelitian ini yaitu PAD terhadap PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari., 2006, "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)", *Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Andirfa, Mulia, 2009, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh)", *Skripsi*, Banda Aceh: FE Universitas
- Syiah Kuala Darussalam. [<http://iurnalak.hlosspot.com/2009/i2/pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-pendapatan.html>].
- Apriana, Dina. dan Suryanto, Rudi., 2010, "Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. XI No. 1, Januari.
- Ariani, Kurnia Rina., 2010, "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan *Tax Effort* (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karidenan Surakarta)", *Skripsi*, Surakarta: FE Universitas Sebelas Maret. [<http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=down&d id=13876>]
- Fitriyanti, Ismi Rizki., 2009, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota, Kabupaten dan Provinsi DIY)", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UMY. Tidak Terpublikasi.
- Ghozali, Imam., 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul., 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Harianto, David, dan Adi, Priyo Hari., 2007, "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita", *Makalah Simposium Na-*

- sional Akuntansi X*, Makasar 26-28 Juli 2007.
- Isa, Filzah Mar'i., 2010, "Pengaruh Dana Aiokasi Umum (DAU), Dana Aiokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara", *Skripsi*, Medan: FE Universitas Sumatera Utara. (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17256>)
- Muliana., 2009, "Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Aiokasi Umum dan Dana Aiokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara", *Skripsi*, Medan: FE Universitas Sumatera Utara. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9752/1/09E01569.pdf>)
- Rumanti, Indah Ari., 2009, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Aiokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa dan Bali", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UMY.
- Sihite, Friska., 2009, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Aiokasi Umum, Dana Aiokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara", *Skripsi*, Medan: FE Universitas Sumatera Utara. (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16467>)
- Silitonga, Mangindang., 2009, "Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara", *Skripsi*, Medan: FE Universitas Sumatera Utara. (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16282>)
- Susantih, Heny. dan Saftiana, Yulia., 2009, "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan", *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XII*, Palembang 4-6 November 2009.
- Susilo, Gideon Tri Budi. dan Hariadi, Priyo., 2007, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah)", *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Sektor Publik Pertama*, Surabaya 25-26 April 2007.